

## Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19

**Saiful Mujani<sup>1</sup> & Deni Irvani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

<sup>2</sup> Saiful Mujani Reserch and Consulting (SMRC)

*Received: 21 Juli 2020*

*Revised: 3 September 2020*

*Published: 20 Oktober 2020*

### **Abstrak:**

Sebuah kebijakan publik akan efektif jika publik mendukungnya. Hal yang sama berlaku dalam konteks wabah Covid-19. Sejauh ini belum ada studi tentang kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan kepatuhan warga terhadapnya. Tulisan ini mengisi kekosongan tersebut dengan bertumpu pada hasil penelitian opini publik nasional tentang sikap dan perilaku publik terkait PSBB dan protokol kesehatan. Hasilnya adalah perilaku dan sikap pada kebijakan tersebut berhubungan dengan latar belakang perilaku politik, kepercayaan pada kemampuan pemerintah menangani Covid-19, status pekerjaan, pendapatan, pendidikan, agama, dan gender. PSBB tidak akan efektif karena jumlah warga yang harus bekerja di luar rumah sangat banyak. Sebaliknya, memberikan subsidi pada warga agar tidak bekerja selama pandemi tetapi tidak jelas kapan akan berakhir, tentu bukan kebijakan yang realistis. Untuk itu, kebijakan mengubah PSBB dengan kembali membolehkan warga bekerja seperti sebelum masa Covid-19 dan disertai protokol kesehatan yang ketat adalah solusi yang lebih realistis. Sosialisasi mendesakny protokol kesehatan harus dilakukan lewat berbagai kelompok masyarakat dan lewat tokoh-tokoh berpengaruh karena mereka cenderung lebih didengar.

### **Keywords:**

Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), protokol kesehatan, sikap dan perilaku warga

### **Pendahuluan**

Tulisan ilmiah tentang sosial-politik terkait Covid-19 sudah mulai bermunculan, akan tetapi cakupan maupun kuantitasnya belum terlalu memadai. Demikian juga terkait dengan sosial-politik Covid-19 di Indonesia. Beberapa kajian misalnya oleh Mujani (2020), Kuipers et al (2020), Mietzner (2020), Jaffrey (2020), dan Dzakwan (2020) mengisi kekosongan tersebut. Fokus tulisan ini bervariasi, mulai dari assessment terhadap kualitas kebijakan pemerintah hingga pengaruh konsisi politik dan demokrasi terhadap kebijakan penanganan Covid-19. Tetapi, yang menjelaskan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan Covid-19 masih

---

### **Korespondensi:**

Jl. Kertamukti No 3, Cirendeau, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419.

Email: saiful.mujani@uinjkt.ac.id.

belum banyak padahal studi mengenai ini penting untuk memperkirakan efektivitas kebijakan tersebut.

Mujani (2020) dan Kuipers et al (2020) memberi perhatian bagaimana publik bersikap dan berperilaku terkait kebijakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Studi Mujani (2020) fokus pada penilaian publik atas kinerja pemerintah menangani Covid-19 di Indonesia, sedang Kuipers et al (2020) terbatas pada sikap dan perilaku publik terkait kebijakan tidak beribadah di luar rumah.. Tetapi, bagaimana sikap dan perilaku publik terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan hanya larangan ibadah di luar rumah, dan protokol kesehatan secara lebih luas belum banyak dibahas secara akademik. Tulisan ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut. Ia merupakan hasil uji empirik terhadap sejumlah hasil studi sebelumnya di berbagai wilayah di dunia dan uji empiris atas beberapa argumen terkait. Tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam studi masalah Covid-19 di Indonesia.

## Hipotesis

Secara teoretis perilaku manusia berhubungan erat dengan sikapnya. Demikian juga dalam kehidupan politik (Campbell at al, 1960). Pandangan ini kemungkinan berlaku juga dalam kasus sikap dan perilaku terkait dengan PSBB dan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Karena itu, hipotesa mengenai hubungan antara sikap dan perilaku terhadap kebijakan terkait PSBB dan protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Hipotesa nol (H0): Sikap terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan tidak berhubungan dengan perilaku mengikuti kebijakan tersebut.  
Hipotesa alternatif (H1): Sikap terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan berhubungan dengan perilaku mengikuti kebijakan tersebut.

Yang menarik, sejumlah studi menemukan bahwa kepatuhan pada kebijakan pemerintah terkait penanganan wabah Covid-19 dipengaruhi oleh sikap dan pengalaman perilaku politik (Mujani 2020, Kuipers et al 2020, Grossman, et al, 2020, Arriola dan Grossman 2020, Alcott et al 2020, Bhanots dan Hopkins 2020, Painter dan Qiu 2020, Adolph et al 2020, Gustomy, 2020). Sikap politik tersebut adalah partisanship atau sikap memihak, mendukung, atau mengidentikkan diri dengan partai politik tertentu. Di samping itu, kepatuhan pada *social distancing* seperti PSBB juga dipengaruhi oleh pengalaman perilaku politik. Satu bentuk dari pengalaman perilaku politik adalah memilih pasangan calon presiden-wakil presiden dalam pemilihan presiden Indonesia 2019. Dalam perspektif sikap dan perilaku politik, orang yang memilih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dibanding pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kemungkinan akan bersikap dan berperilaku positif terkait kebijakan PSBB karena pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang memenangkan pemilihan presiden tersebut dan yang kemudian membuat kebijakan PSBB. Karena itu tulisan ini melaporkan hasil uji hipotesa kedua dan ketiga berikut:

2. Hipotesa nol ( $H_0$ ): Memilih pasangan calon presiden-wakil presiden pada pemilihan presiden 2019 tidak punya hubungan dengan perilaku melaksanakan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.  
Hipotesa alternatif (COVID-1): Memilih pasangan calon presiden-wakil presiden pada pemilihan presiden 2019 punya hubungan dengan perilaku melaksanakan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
3. Hipotesa nol ( $H_0$ ): Memilih pasangan calon presiden-wakil presiden pada pemilihan presiden 2019 tidak punya hubungan dengan sikap terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.  
Hipotesa alternatif (Covid-19): Memilih pasangan calon presiden-wakil presiden pada pemilihan presiden 2019 punya hubungan dengan sikap terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.

Tulisan ini juga melaporkan hasil uji hubungan antara keyakinan pada kemampuan pemerintah menangani wabah Covid-19 dengan sikap dan perilaku patuh pada kebijakan PSBB dan protokol kesehatan. Dasar pemikirannya adalah bahwa sikap dan perilaku publik pada pemerintah tergantung pada sikap percaya atau tidak percaya pada pemerintah (Ulbig, 2008), termasuk percaya pada kemampuan dan kesungguhan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Bila kepercayaan publik ini ada maka publik akan bersikap dan berperilaku positif terhadap PSBB. Atas dasar pemikiran ini maka hipotesa berikutnya (4 dan 5) adalah:

4. Hipotesa nol ( $H_0$ ): Keyakinan pada kemampuan pemerintah mengatasi masalah pandemi Covid-19 tidak punya hubungan dengan perilaku terkait dengan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.  
Hipotesa alternatif ( $H_1$ ): Keyakinan pada kemampuan pemerintah mengatasi masalah pandemi Covid -19 punya hubungan dengan perilaku terkait dengan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.
5. Hipotesa nol ( $H_0$ ): Keyakinan pada kemampuan pemerintah mengatasi masalah pandemi Covid-19 tidak punya hubungan dengan sikap terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.  
Hipotesa alternatif ( $H_1$ ): Keyakinan pada kemampuan pemerintah mengatasi masalah pandemi Covid-19 punya hubungan dengan sikap terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.

Dalam perspektif ekonomi politik, sikap dan perilaku massa terhadap sistem politik dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya berhubungan dengan kondisi ekonomi mereka (Clark et al, 1994; Mujani 2020). Seseorang akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan sebuah kebijakan bila kebijakan itu menguntungkan dirinya. Dalam perspektif ini, menguntungkan yang dimaksud berkaitan dengan kebutuhan material hidupnya, yakni ekonomi. Seseorang yang merasakan keadaan ekonominya sekarang lebih baik maka ia cenderung akan bersikap dan berperilaku positif terhadap setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Atas dasar itu, maka hipotesa 6 dan 7 adalah:

6. Hipotesa nol ( $H_0$ ): Kondisi ekonomi seseorang tidak punya hubungan dengan perilakunya terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan

Hipotesa alternatif (H1): Kondisi ekonomi seseorang punya hubungan dengan perilakunya terhadap kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.

7. Hipotesa nol (H0): Kondisi ekonomi seseorang tidak punya hubungan dengan sikapnya terkait kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.

Hipotesa alternatif (H1): Kondisi ekonomi seseorang punya hubungan dengan sikapnya terkait kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.

Kebijakan PSBB dan protokol kesehatan berhubungan dengan pembatasan orang untuk bekerja di luar rumah. Kebijakan ini menjadi relevan bagi orang yang biasa bekerja di luar rumah. Karena itu orang yang biasa bekerja di luar rumah kemungkinan bersikap negatif dan berperilaku menolak kebijakan PSBB dan protokol kesehatan tersebut. Atas dasar ini maka hipotesa 8 dan 9 adalah:

8. Hipotesa nol (H0): Orang bekerja atau tidak bekerja tidak punya hubungan dengan perilaku terhadap PSBB dan protokol kesehatan.

Hipotesa alternatif (H1): Orang bekerja atau tidak bekerja punya hubungan dengan perilaku terhadap PSBB dan protokol kesehatan

9. Hipotesa nol (H0): Orang yang bekerja atau tidak bekerja tidak punya hubungan dengan sikap terkait kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.

Hipotesa alternatif (COVID-1): Orang yang bekerja atau tidak bekerja punya hubungan dengan sikap terkait kebijakan PSBB dan protokol kesehatan.

Kebijakan PSBB dan protokol kesehatan membatasi orang untuk bisa produktif secara ekonomi. Karena itu mungkin orang yang penghasilannya lebih tinggi akan mematuhi PSBB karena walaupun tidak bekerja di luar rumah kebutuhan pokoknya biasa dipenuhi. Sementara orang yang rendah penghasilannya mungkin tidak bisa mematuhi karena tanpa bekerja tiap hari di luar rumah tidak bisa memenuhi kebutuhan. Maka hipotesa 10 dan 11 adalah:

10. Hipotesa nol (H0): Pendapatan seseorang tidak punya hubungan dengan perilakunya terkait PSBB.

Hipotesa alternatif (H1): Pendapatan seseorang punya hubungan dengan perilakunya terkait PSBB.

11. Hipotesa nol (H0): Pendapatan seseorang tidak punya hubungan dengan sikapnya terkait PSBB.

Hipotesa alternatif (H1): Pendapatan seseorang punya hubungan dengan sikapnya terkait PSBB.

Pendidikan biasanya berhubungan dengan pendapatan. Di samping itu pendidikan juga kemungkinan berhubungan dengan pengetahuan, termasuk tentang bahaya Covid-19. Karena itu, pendidikan mungkin punya hubungan dengan sikap dan perilaku terkait PSBB sebagai kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19. Maka hipotesa 12 dan 13 adalah:

12. Hipotesa nol (H0): Tingkat pendidikan seseorang tidak punya hubungan dengan perilakunya terkait PSBB.

Hipotesa alternatif (H1): Tingkat pendidikan seseorang punya hubungan dengan perilakunya terkait PSBB.

13. Hipotesa nol (H0): Tingkat pendidikan seseorang tidak punya hubungan dengan sikapnya terkait PSBB.

Hipotesa alternatif (H1): Tingkat pendidikan seseorang tidak punya hubungan dengan sikapnya terkait PSBB.

Sikap positif atau preferensi massa pada pemimpin nasional berhubungan dengan kesamaan suku-bangsa atau etnik antara kelompok massa tersebut dengan kepemimpinan nasional (Mujani, 2018, Wang, 2018). Kebijakan publik yang dibuat pemerintah berhubungan dengan latar belakang suku-bangsa pemimpin pemerintah yang membuat kebijakan tersebut. Massa akan mendukung kebijakan pemerintah bila pemimpin pemerintah yang membuat kebijakan tersebut sama suku-bangsanya dengan massa tersebut. (Arriola dan Grossman, 2020). Dalam konteks PSBB, pemimpin pemerintah pusat adalah Presiden Joko Widodo. Latar belakang suku-bangsanya adalah Jawa. Karena itu orang Jawa kemungkinan mendukung PSBB yang dibuat pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo. Maka hipotesa 14 dan 15 adalah:

14. Hipotesa nol (H0): Latar belakang suku-bangsa seseorang tidak punya hubungan dengan perilakunya terhadap PSBB.

Hipotesa alternatif (H1): Latar belakang suku-bangsa seseorang punya hubungan dengan perilakunya terhadap PSBB.

15. Hipotesa nol (H0): Latar belakang suku-bangsa seseorang tidak punya hubungan dengan sikapnya terkait PSBB.

Hipotesa alternatif (H1): Latar belakang suku-bangsa seseorang punya hubungan dengan sikapnya terkait PSBB.

Menurut sebuah studi, perbedaan agama berpengaruh pada kepatuhan pada aturan agar ibadah dilakukan di rumah saja. Orang yang beragama Islam dibanding yang beragama selainnya tidak mematuhi kebijakan tersebut (Kuipers et al, 2020). Apakah hubungan ini tetap signifikan ketika kebijakannya diperluas, yakni PSBB, bukan hanya salah satu darinya, yakni aturan agar ibadah tidak dilakukan di luar rumah. Maka hipotesa 16 dan 17 adalah:

16. Hipotesa nol (H0): Latar belakang agama seseorang tidak berhubungan dengan perilakunya terkait kebijakan PSBB.

Hipotesa alternatif (H1): Latar belakang agama seseorang berhubungan dengan perilakunya terkait kebijakan PSBB.

17. Hipotesa nol (H0): Latar belakang agama seseorang tidak berhubungan dengan sikapnya terkait kebijakan PSBB.

Hipotesa alternatif (H1): Latar belakang agama seseorang berhubungan dengan sikapnya terkait kebijakan PSBB.

Secara global, senior, dari pada junior lebih rentan tertular Covid-19.<sup>1</sup> Karena itu seorang senior kemungkinan lebih hati-hati dengan dampak Covid-19 ini sehingga mereka cenderung akan mematuhi PSBB sebagai kebijakan untuk mencegah tertular Covid-19. Maka hipotesa 18 dan 19 adalah:

---

<sup>1</sup> Lihat misalnya statistik yang dilaporkan Worldometer: <https://Covid.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/> diakses 22 Agustus 2020, jam 19:50.

18. Hipotesa nol (H<sub>0</sub>): Tidak ada hubungan antara umur dan perilaku terhadap kebijakan PSBB  
Hipotesa alternatif (H<sub>1</sub>): Ada hubungan antara umur dan perilaku terhadap kebijakan PSBB.
19. Hipotesa nol (H<sub>0</sub>): Tidak ada hubungan antara umur dan sikap terkait kebijakan PSBB  
Hipotesa alternatif (H<sub>1</sub>): Ada hubungan antara umur dan sikap terkait kebijakan PSBB.

Perbedaan gender kemungkinan berhubungan dengan sikap terhadap dan perilaku terkait PSBB. Laki-laki, dibanding perempuan, kemungkinan bersikap negatif terhadap kebijakan PSBB karena kegiatan di luar rumah dalam masyarakat secara umum lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Dalam masyarakat, masih ada bias gender bahwa kegiatan di luar rumah adalah hak laki-laki. Setidaknya, kesempatan beraktivitas di luar rumah lebih terbuka untuk laki-laki. Kemungkinan masih ada pandangan dalam masyarakat bahwa perempuan lebih baik beraktivitas di rumah. Karena kebiasaan dan cara pandang ini maka laki-laki kemungkinan tidak mendukung dan tidak berperilaku sesuai kebijakan PSBB karena ia lebih biasa beraktivitas di luar rumah dibanding perempuan.<sup>2</sup> Maka hipotesa 20 dan 21 adalah:

20. Hipotesa nol (H<sub>0</sub>): Perbedaan gender tidak berhubungan dengan perilaku pada kebijakan PSBB.  
Hipotesa alternatif (H<sub>1</sub>): Perbedaan gender berhubungan dengan perilaku pada kebijakan PSBB.
21. Hipotesa nol (H<sub>0</sub>): Perbedaan gender tidak berhubungan dengan sikap terkait kebijakan PSBB  
Hipotesa alternatif (H<sub>1</sub>): Perbedaan gender berhubungan dengan sikap terkait kebijakan PSBB.

## Metode Riset dan Cara Pengukuran

Studi sikap dan perilaku publik atas berbagai kebijakan biasa bersandar pada survei opini publik. Cara studi ini merupakan standar dalam studi perilaku politik (Curtice, 2007). Tulisan ini sepenuhnya bersandar pada data dari survei opini publik berskala nasional yang dilakukan pada bulan April 2020 ketika wabah Covid-19 secara resmi dinyatakan oleh pemerintah sudah menyebar di tanah air dalam waktu 1 bulan (sejak Maret), dan pemerintah telah menetapkan kebijakan PSBB di sejumlah daerah pada waktu itu.<sup>3</sup>

Dalam tulisan ini pengukuran tentang sikap dan perilaku warga terhadap kebijakan *social distancing* dalam bentuk PSBB dan protokol kesehatan dalam rangka pengendalian penyebaran wabah Covid-19 adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat misalnya, kegiatan di luar rumah menurut perbedaan gender masih terjadi. Lihat misalnya <https://Covid.statista.com/statistics/190118/outdoor-activities-participation-by-gender-in-the-us-2009/> diakses 22 Agustus 2020, jam 20: 10.

<sup>3</sup> Penjelasan rinci tentang metodologi lihat appendix 2.

<sup>4</sup> Lebih detail bentuk pertanyaan dalam survei, *coding*, *scoring*, dan *indexing* lihat appendix 1.

Perilaku adalah perbuatan atau tindakan terkait pengaturan jarak sosial, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu pengalaman melakukan atau tidak melakukan kegiatan berikut dalam seminggu terakhir:

1. Tidak bekerja di luar rumah
2. Tidak pulang kampung untuk 'idul fitri
3. Tidak melakukan ibadah di luar rumah secara kolektif
4. Tidak naik ojeg/ojeg online
5. Tidak mendatangi kegiatan di luar rumah yang dihadiri oleh lebih dari lima orang

Sikap adalah pendirian mendukung atau tidak mendukung, setuju atau tidak setuju, yakin atau tidak yakin, dengan ketentuan dan anjuran-anjuran terkait pengaturan jarak sosial, PSBB, berikut:

1. Bekerja di rumah
2. Beribadah di rumah
3. Menghindari kerumunan lebih dari 5 orang
4. Kendaraan pribadi dikurangi penumpangnya
5. Kendaraan umum dikurangi penumpangnya
6. Mengendarai sepeda motor tidak boleh membonceng
7. Ojeg/ojol tidak boleh mengangkut penumpang
8. Percaya PSBB dapat menekan penyebaran wabah
9. Harus memakai masker
10. Harus jaga jarak minimal 1 meter
11. Harus cuci tangan pakai sabun secara teratur dengan air mengalir
12. Tidak ke luar rumah
13. Sanksi denda bagi pelanggar PSBB
14. Sanksi pidana bagi pelanggaran PSBB

### **Sikap dan Perilaku Warga pada PSBB dan Protokol Kesehatan**

Statistik deskriptif menggambarkan bagaimana perilaku dan sikap warga dengan berbagai kebijakan terkait dengan PSBB dan protokol kesehatan (Tabel 1). Warga secara nasional umumnya berperilaku sesuai dengan ketentuan PSBB (skor rerata 0,70 dalam indeks berskala 0-1).<sup>5</sup> Ada sekitar 70% dari warga yang bertindak dengan mematuhi PSBB. Namun sisanya, 30%, tidak mematuhi. Dalam konteks pandemi, 30% itu sangat besar.<sup>6</sup> Lebih dari cukup untuk menyebarkan Covid-19 ke seluruh tanah air bila banyak di antara mereka positif terinfeksi.

Di samping itu, tingkat kepatuhan pada PSBB itu juga sangat bervariasi, dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi (Tabel 1). Secara nasional warga umumnya menyatakan tidak pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman (skor rerata 0,89 dalam skala 0-1). Warga umumnya juga tidak ke luar rumah untuk beribadah (skor rerata 0,64 dalam skala 0-1), tidak naik ojek (skor rerata 0,87 dalam skala 0-1), tidak menghadiri kegiatan di tempat umum yang

<sup>5</sup> Indeks dibuat dengan asumsi bahwa setiap item punya bobot yang sama, dan cara membacanya lebih sederhana. Pembuatan indeks ini dimungkinkan karena korelasi inter-itemnya positif dan signifikan.

<sup>6</sup> Menurut hasil penyusunan daftar pemilih tetap terakhir oleh KPU, warga dewasa (berumur 17 tahun atau lebih, atau telah menikah) yang jadi populasi dalam survei ini sekitar 190 juta orang. Angka 30% dari 190 juta sekitar 57 juta orang. Sangat banyak.

melibatkan banyak orang (skor rerata 0,68 dalam skala 0-1). Namun demikian kebanyakan warga masih ke luar rumah untuk bekerja (skor rerata 0,45 dalam skala 0-1). Artinya 55% warga masih bekerja di luar rumah. Di samping itu, walaupun tidak mayoritas, masih banyak warga yang ke luar rumah untuk ibadah (sekitar 36%).

Pada tingkat perilaku masih banyak warga yang berkegiatan di luar rumah. Mereka tidak mengikuti kebijakan PSBB. Bagaimana pada tingkat sikap atas kebijakan terkait PSBB tersebut? Secara umum sikap warga terhadap kebijakan PSBB konsisten dengan tingkat perilakunya (Tabel 1). Secara umum warga bersikap positif pada kebijakan pemerintah dalam bentuk PSBB untuk mencegah meluasnya pandemi Covid-19 di tanah air. Skor rerata dari indeks sikap patuh pada PSBB sebesar 2,64 dalam skala 1-3, yang berarti secara umum sebagian besar warga setuju dengan kebijakan PSBB tersebut.

Tabel 1. Statistik deskriptif perilaku dan sikap terhadap sejumlah aturan terkait PSBB dan protokol kesehatan (usahakan dalam layout tabel ini tidak memotong halaman)

	N	Min	Max	Mean	St. Dev
I. Perilaku jarak sosial (indeks)	1190	.00	1.00	.7044	.26414
1. Tidak pulang kampung untuk idul fitri dan tahu pemerintah mengimbau tidak mudik	1190	.00	1.00	.8856	.31840
2. Tidak keluar rumah untuk bekerja dalam seminggu terakhir	1190	.00	1.00	.4510	.49781
3. Tidak keluar rumah untuk ibadah dalam seminggu terakhir	1190	.00	1.00	.6356	.48147
4. Tidak Naik ojek/ojek online dalam seminggu terakhir	1190	.00	1.00	.8655	.34134
5. Tidak Mendatangi kegiatan di tempat umum dengan peserta lebih dari 5 orang dalam seminggu terakhir	1190	.00	1.00	.6841	.46506
II. Sikap terhadap kebijakan terkait PSBB (indeks)	1190	1.00	3.00	2.6444	.36672
1. Bekerja di rumah, kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang ditetapkan pemerintah	1190	1.00	3.00	2.3800	.92045
2. Kegiatan keagamaan di rumah masing-masing	1190	1.00	3.00	2.6086	.78786
3. Kegiatan di tempat umum yang mendatangkan lebih dari 5 orang dilarang	1190	1.00	3.00	2.7309	.67472
4. Mobil pribadi dikurangi penumpangnya	1190	1.00	3.00	2.7662	.63025
5. Angkutan umum dikurangi jumlah penumpangnya menjadi setengah dari biasanya	1190	1.00	3.00	2.7361	.66443
6. Sepeda motor tidak boleh membonceng	1190	1.00	3.00	2.3218	.93652
7. Ojek/ojek on-line tidak boleh bawa orang, hanya boleh antar barang	1190	1.00	3.00	2.6268	.76291
8. Percaya Strategi PSBB Mampu Cegah COVID-19	1190	1.00	3.00	2.8203	.52245
9. Percaya bisa mencegah COVID-19: Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain	1190	1.00	3.00	2.9208	.36857
10. Percaya bisa mencegah COVID-19: Memakai masker	1190	1.00	3.00	2.9438	.30162



11. Percaya bisa mencegah COVID-19: Sering cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir	1190	1.00	3.00	2.9579	.25711
12. Percaya bisa mencegah COVID-19: Tidak ke luar rumah	1190	1.00	3.00	2.8691	.47551
13. Setuju sanksi bagi yang Melanggar PSBB	1190	1.00	3.00	2.2568	.94048
14. Setuju hukuman penjara/denda bagi yang mudik	1190	1.00	3.00	2.0826	.93125

Namun demikian, ada variasi cukup signifikan dalam sikap terhadap berbagai kebijakan terkait PSBB dan protokol kesehatan. Yang paling positif adalah sikap percaya dengan cuci tangan pakai sabun serta dengan air mengalir secara teratur dapat mencegah penularan Covid-19 (skor rerata 2.96 dalam skala 1-3), memakai masker (2,94), jaga jarak dari orang lain minimal satu meter (2,92). Walaupun mayoritas masih mendukung, sikap-sikap mendukung pada aturan-aturan PSBB yang lain lebih rendah, mencakup sanksi denda terhadap pelanggar PSBB (2,26), sanksi denda/pidana bagi yang mudik mau lebaran (2,08), tidak boleh membonceng di kendaraan bermotor (2,32), dan bekerja di rumah saja kecuali bagi jenis pekerjaan yang menurut aturan dibolehkan. (2,38).

Bagaimana menjelaskan variasi dalam perilaku dan sikap terkait kebijakan PSBB dan protokol kesehatan terkait wabah Covid-19 tersebut? Seperti telah dikemukakan pada serangkaian hipotesa sebelumnya, perilaku dan sikap patuh tersebut kemungkinan dapat dijelaskan dengan sejumlah faktor, yaitu politik yang mencakup kepercayaan terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi Covid-19, sikap partisan terkait pengalaman perilaku politik pada pemilihan presiden 2019, ekonomi, dan sejumlah demografi.

Statistik bivariate di bawah menggambarkan variabel-variabel mana berhubungan signifikan secara statistik dengan perilaku dan sikap terhadap sejumlah ketentuan dan anjuran terkait PSBB dan protokol kesehatan (Tabel 2). Pertama, hipotesa yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara sikap dan perilaku terhadap PSBB dan protokol kesehatan ( $H_0$ ) ditolak. Ada hubungan antara keduanya, dan hubungan tersebut positif dan secara statistik signifikan. Hipotesa alternatif ( $H_1$ ) diterima ( $p \leq 0,01$ ). Ada konsistensi antara sikap dan perilaku terkait. Yang bersikap positif terhadap PSBB dan protokol kesehatan cenderung melaksanakan ketentuan-ketentuan PSBB tersebut.

Selanjutnya, hipotesa nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pilihan pasangan calon presiden-wakil presiden baik dengan sikap maupun perilaku terkait PSBB dan protokol kesehatan. Kedua hipotesa nol ini ditolak. Warga yang pada pemilihan presiden 2019 memilih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amien dibanding pasangan lainnya cenderung bersikap positif terhadap kebijakan PSBB ( $p \leq 0,01$ ), dan cenderung berperilaku sesuai aturan PSBB ( $p \leq 0,05$ ).

Hipotesa nol yang menyatakan tidak ada hubungan antara keyakinan bahwa pemerintah dapat menanggulangi pandemi Covid-19 dengan sikap terhadap kebijakan PSBB ditolak. Terbukti ada hubungan signifikan secara statistik antara keduanya ( $p \leq 0,01$ ). Di samping itu, hipotesa nol yang menyatakan bahwa keyakinan atas kemampuan pemerintah mengatasi masalah Covid-19 tidak ada hubungannya dengan

perilaku sesuai ketentuan PSBB juga ditolak. Sebaliknya, keduanya berhubungan secara positif dan secara statistik signifikan. ( $p \leq 0,05$ ).

Hipotesa nol selanjutnya bahwa kondisi ekonomi rumah tangga tidak punya hubungan dengan sikap terhadap kebijakan PSBB terbukti secara empiris. Hipotesa nol diterima. Memang tidak ada hubungan antara kondisi ekonomi rumah tangga dengan sikap terhadap kebijakan PSBB. Demikian juga hubungan antara kondisi ekonomi rumah tangga dengan perilaku mengikuti aturan PSBB. Hipotesa nol diterima. Tidak ada hubungan signifikan antara keduanya secara statistik.

Hipotesa nol bahwa status pekerjaan, yakni bekerja atau tidak bekerja, tidak punya hubungan dengan sikap terhadap PSBB ( $H_0$ ) terbukti secara empirik. Baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja tidak beda sikapnya terhadap kebijakan PSBB. Tapi hipotesa nol yang menyatakan bahwa status pekerjaan itu tidak punya hubungan dengan perilaku mengikuti ketentuan PSBB ditolak. Keduanya terbukti punya hubungan signifikan secara statistik ( $p \leq 0,01$ ). Artinya, warga yang punya pekerjaan, lepas dari jenis pekerjaannya, secara umum cenderung tidak mengindahkan ketentuan PSBB.

Bagaimana hubungan antara pendidikan dan sikap terhadap PSBB? Hipotesa nol menyatakan tidak ada hubungan antara pendidikan dan sikap terhadap PSBB. Hipotesa ini ditolak. Pendidikan ternyata punya hubungan signifikan dengan sikap terhadap PSBB ( $p \leq 0,01$ ). Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang warga maka ia cenderung mendukung PSBB tersebut.

Pola hubungan yang sama juga terlihat pada hubungan antara tingkat pendapatan dan sikap terhadap PSBB. Hipotesa nol yang menyatakan bahwa pendapatan tidak punya hubungan dengan sikap terhadap PSBB ditolak. Keduanya ternyata punya hubungan signifikan ( $p \leq 0,01$ ). Semakin tinggi tingkat pendapatan seorang warga maka ia semakin bersikap positif terhadap PSBB.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya adanya hubungan antara pendidikan dan pendapatan dengan sikap terhadap PSBB, kemungkinan karena warga yang berpendidikan lebih tinggi lebih memahami bagaimana bahaya Covid-19 bagi kesehatan warga secara umum. Warga yang berpendidikan lebih tinggi juga cenderung punya penghasilan lebih baik dan karena itu punya daya tahan secara ekonomi setidaknya untuk sementara untuk tidak melakukan kegiatan atau bekerja di luar rumah, dan karena itu ia mendukung ketentuan PSBB.

Bagaimana hubungan antara suku-bangsa dengan sikap terhadap PSBB. Hipotesa nol menyatakan bahwa suku-bangsa tidak punya hubungan dengan sikap terhadap PSBB, dan suku-bangsa tidak punya hubungan dengan perilaku terkait PSBB. Kedua hipotesa nol ini diterima. Terbukti secara empiris tidak ada hubungan antara suku-bangsa baik dengan sikap maupun perilaku terkait PSBB. Asumsi bahwa orang Jawa akan mendukung dan berperilaku sesuai PSBB karena PSBB kebijakan pemerintah di bawah Presiden Jokowi yang orang Jawa tidak terbukti secara empiris.

Pola berbeda ditunjukkan dalam hubungan antara agama dan sikap terhadap PSBB. Hipotesa nol bahwa agama dan sikap terhadap dan perilaku mengikuti ketentuan

PSBB secara empiris ditolak. Agama ternyata berhubungan secara signifikan dengan sikap terhadap dan dengan perilaku sesuai ketentuan PSBB. Masing-masing berhubungan signifikan pada  $p \leq 0,01$ . (Tabel 2). Warga yang beragama Islam, dibanding yang beragama non-Islam, cenderung tidak setuju dengan PSBB dan cenderung melanggarnya. Perbedaan ini perlu studi lebih lanjut.

Tabel 2. Korealsi (r's Pearson) perilaku dan sikap atas kebijakan terkait PSBB dan sejumlah variabel lain

Vareabel	Indeks Perilaku Terhadap Kebijakan	Indeks Sikap Terhadap Kebijakan
Indeks perilaku terhadap kebijakan	1	.153**
Indeks sikap terhadap kebijakan	.153**	1
Pilihan pasangan calon presiden-wakil presiden	.075*	.108**
Percaya pada pemerintah mampu atasi COVID-19	.062*	.206**
Kondisi ekonomi rumah tangga	-.008	-.009
Status pekerjaan: Bekerja	-.166**	.003
Pendidikan	.024	.101**
Pendapatan	-.041	.100**
Suku-bangsa	-.041	.023
Agama Islam	-.146**	-.081**
Umur	-.025	.015
Gender: Laki-laki	-.156**	-.062*

\*\* $p \leq 0,01$ , \* $p \leq 0,05$

Perbedaan pengaruh agama tersebut kemungkinan terkait dengan sifat dasar agama masing-masing dalam soal sembahyang atau ibadah. Sifat dasar dan intensitas sembahyang atau ibadah dalam Islam berbeda dan mungkin lebih tinggi dari pada dalam agama lain. Misalnya saja, setiap Muslim diwajibkan melakukan salat 5 kali dalam 24 jam. Ini wajib, bukan anjuran (sunnah). Bila seorang Muslim dewasa tidak melaksanakan maka ia berdosa. Namun demikian, pahala ibadah fardu 'ain tersebut jauh lebih sedikit dibanding ibadah secara berjamaah walaupun sunnah hukumnya. Perbandingan ibadah sendiri dengan ibadah berjamaah adalah 1 berbanding 27 menurut hadis populer di kalangan umat Islam.<sup>7</sup> Pahala yang berlipat dari salat berjamaah itu dapat memotivasi Muslim untuk salat berjamaah baik dengan keluarga di rumah atau dengan Muslim lain di luar rumah. Tapi kemungkinan yang memotivasi lebih kuat seorang Muslim untuk sembahyang berjamaah di luar rumah atau di masjid adalah al-Qur'an yang menyatakan bahwa yang memakmurkan Masjid hanya orang beriman.<sup>8</sup> Sekilas orang bisa mengartikan bahwa yang tidak memakmurkan masjid adalah orang yang tidak beriman. Tentu saja para ahli bisa menafsirkan lain, termasuk konteks ayat dan konteks sekarang yang sedang darurat Covid-19.

<sup>7</sup> Hadis menyatakan, "shalat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding shalat sendirian." (Hadis riwayat HR. Bukhari no. 645, dan Muslim no. 650).

<sup>8</sup> "Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apapun) kecuali pada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk yang mendapat petunjuk." (at-Taubah: 18).

Bagaimana dengan hubungan antara umur dengan sikap terhadap dan perilaku sesuai aturan PSBB? Hipotesa nol menyatakan bahwa umur tidak punya hubungan dengan sikap terhadap PSBB, dan hipotesa nol yang lain menyatakan bahwa umur tidak punya hubungan dengan perilaku sesuai dengan PSBB, diterima. Terbukti secara empiris bahwa umur memang tidak berhubungan dengan sikap maupun perilaku terkait PSBB. Pandangan yang dikemukakan sebelumnya bahwa orang senior yang lebih rentan terinfeksi virus Corona dan karena itu ia akan lebih mendukung segala kebijakan yang membatasi jarak sosial (PSBB) tidak terbukti secara empiris.

Mengenai hubungan antara gender dengan kebijakan terkait PSBB dinyatakan dalam dua hipotesa nol: Gender tidak berhubungan dengan sikap terkait PSBB, dan gender tidak berhubungan dengan perilaku terkait PSBB. Uji empiris menolak kedua hipotesa nol tersebut. Gender berhubungan secara signifikan baik dengan sikap maupun dengan perilaku terkait kebijakan PSBB. Laki-laki dibanding perempuan cenderung bersikap negatif pada PSBB ( $p \leq .05$ ). Laki-laki, dibanding perempuan, juga cenderung berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan PSBB ( $p \leq .01$ ). Sebabnya mungkin bukan karena perbedaan jenis kelamin tapi lebih karena kebiasaan dalam masyarakat bahwa laki-laki diberi kesempatan lebih banyak untuk beraktivitas di luar rumah sehingga PSBB dirasakan oleh laki-laki mengganggu aktivitasnya. Pola ini juga menunjukkan bias laki-laki akibat dari konstruksi sosial dalam masyarakat yang selama ini masih banyak mendiskriminasi perempuan untuk kegiatan di luar rumah.

Kalau dilakukan telaah lebih jauh sejauh mana hubungan-hubungan tersebut konsisten setelah memepertimbangkan berbagai faktor secara simultan lewat analisis multivariate (regresi linear ganda), maka diperoleh pola hubungan paling konsisten (Tabel 3 dan Tabel 4).<sup>9</sup> Untuk perilaku terkait PSBB, yang paling konsisten mempengaruhi perilaku terkait PSBB adalah sikap terhadap PSBB itu sendiri lepas dari pengaruh berbagai faktor lainnya.<sup>10</sup> Orang yang setuju dengan PSBB cenderung berperilaku sesuai

---

<sup>9</sup> Dalam analisis multivariate ini, pada regresi pertama (Tabel 3) variabel terikatnya (*dependent variable*) adalah perilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan PSBB. Ini merupakan indeks perilaku. Pada regresi kedua (Tabel 4) variabel terikatnya adalah sikap terhadap ketentuan-ketentuan dalam PSBB dan protokol kesehatan. Ia merupakan indeks sikap terkait PSBB dan protokol kesehatan. Konstruksi kedua indeks tersebut, pengkodean, dan pemberian skor semua variabel yang terkait dalam analisis multivariate ini lihat appendix 1. Sementara variabel bebas yang disertakan dalam kedua analisis ini dipilih atas dasar uji korelasi (Tabel 2). Hanya variabel-variabel bebas yang berhubungan signifikan dengan sikap atau dengan perilaku terkait PSBB yang disertakan dalam kedua analisis tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. Regresi yang digunakan dalam analisis perilaku terkait PSBB (Tabel 3) adalah model linear dengan metode Weighted Least Square (WLS) karena pertimbangan bahwa ia lebih sederhana untuk menafsirkan hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Namun demikian, kami juga melakukan analisis dengan model regresi lain yang relevan, yakni Tobit dan *fractional regression*, untuk memastikan apakah efek masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara statistik signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil model Tobit dan *fractional regression* ternyata tidak berbeda dengan model linear yang kami gunakan dalam makalah ini.

<sup>10</sup> Dalam model dengan variabel terikat Perilaku Kebijakan tidak terjadi heteroskedastisitas (pada uji heteroskedastisitas Breusch-Pagan / Cook-Weisberg,  $p = 0.1573$ , atau tidak signifikan). Sementara itu pada model untuk variabel terikat sikap terkait kebijakan PSBB, heteroskedastisitas terjadi. Karena itu, *robust standard error* dapat digunakan untuk menggantikan *classical standard error* yang digunakan dalam paper. Meskipun demikian, penggunaan *robust standard error* ini tidak mengubah interpretasi

dengan ketetapan yang ditentukan dalam PSBB. Pengaruhnya positif dan secara statistik signifikan pada  $p \leq 0.001$ . (Tabel 3)

Status pekerjaan, apakah bekerja atau tidak bekerja, juga punya pengaruh konsisten pada perilaku terkait PSBB lepas dari berbagai faktor lain. Pengaruhnya negatif dan signifikan secara statistik pada  $p \leq 0.001$  (Tabel 3). Orang yang bekerja dibanding yang tidak bekerja cenderung melanggar ketentuan PSBB. Orang tak bekerja karena ia seorang ibu rumah tangga, masih sekolah atau kuliah, belum dapat pekerjaan, atau baru berhenti dari pekerjaan. Semua warga ini walaupun dalam keadaan susah misalnya tentu akan banyak tinggal di rumah dibanding yang biasa bekerja di luar rumah sehingga otomatis membuat jarak sosial sebagaimana diharapkan PSBB.

Agama juga pengaruhnya sangat konsisten dan signifikan secara statistik terhadap perilaku terkait PSBB ( $p \leq 0.001$ ) (Tabel 3). Orang Islam dibanding orang non-Islam - lepas dari berbagai faktor lainnya seperti pendidikan, tingkat penghasilan, status pekerjaan, sikap terhadap PSBB misalnya - tidak patuh terhadap ketentuan dalam PSBB. Dibanding seorang non-Muslim, seorang Muslim cenderung melanggar ketentuan agar setiap warga membuat jarak sosial untuk berbagai bentuk kegiatan, termasuk dalam kegiatan keagamaan dan kerja. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Islam dan non-Islam punya perbedaan dalam meyakini ibadah. Di samping itu, kemungkinan jama'ah Kristen terbiasa dengan apa yang disebut "gereja-rumah" plus "imamat am," yang berarti "keimaman universal."<sup>11</sup> Kaum Nasrani di Indonesia secara kelembagaan mungkin lebih solid sehingga himbuan atau anjuran gereja lebih mudah sampai dan didengar. Sebagai gantinya dilakukan ibadah online.<sup>12</sup> Perbedaan ini yang membuat beda sikap dan perilaku antara keduanya.

Tentu saja dalam Islam juga diakui adanya kaidah-kaidah pengecualian karena keadaan darurat seperti sedang menyebarnya wabah Covid-19. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan banyak lembaga-lembaga Islam lain dan juga tokoh-tokohnya telah menyampaikan bahwa dalam keadaan darurat ibadah di rumah lebih baik.<sup>13</sup> Namun demikian, tentu tidak mudah mengubah keyakinan dan kebiasaan orang Islam pada umumnya, dan karena itu banyak yang tetap ibadah di luar rumah.

Efek perbedaan gender juga konsisten, lepas dari faktor-faktor lain, termasuk agama, sikap terhadap PSBB, dan demografi lainnya. Laki-laki dibanding perempuan cenderung melanggar PSBB. Perbedaannya signifikan secara statistik pada  $p \leq 0,01$ . Seperti dikemukakan sebelumnya, perbedaan ini kemungkinan akibat dari kebiasaan yang masih sangat kuat dalam masyarakat bahwa laki-laki punya kesempatan lebih besar untuk melakukan kegiatan di luar rumah seperti bekerja, berinteraksi dengan berbagai

---

model dalam hal signifikansi efek masing-masing variabel bebas pada variabel terikat pada tingkat kepercayaan 95%. Karena itu kami mempertahankan hasil WLS tersebut. Karena keterbatasan halaman, semua hasil analisis ini tidak disertakan dalam tulisan ini. Ada pada penulis dan tersedia bagi yang berminat.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pendeta Dr. Martin L. Sinaga, 19 Juli 2020.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pendeta Dr. Martin L. Sinaga, 19 Juli 2020.

<sup>13</sup> Akses <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/28/12233361/cegah-COVID-19-mui-shalat-di-rumah-adalah-keutamaan> diakses 19 Juli 2020, jam 06:21.

kelompok dalam masyarakat, dan lain-lain. Kebiasaan laki-laki yang punya keistimewaan lebih dari perempuan dalam kegiatan di luar rumah ini yang membuat laki-laki cenderung tidak mematuhi PSBB yang membatasi warga berkegiatan di luar rumah.

Sementara itu faktor pengalaman politik dan kepercayaan pada pemerintah dalam mengatasi Covid-19 tidak punya hubungan signifikan dengan perilaku terkait PSBB terutama setelah mempertimbangkan faktor sikap terhadap PSBB sendiri. Artinya, pengalaman memilih presiden pada 2019 menjadi tidak berpengaruh signifikan pada perilaku mematuhi PSBB secara langsung setelah mempertimbangkan faktor sikap pada PSBB. Ini terjadi, seperti terlihat dalam uji korelasi (Tabel 2) karena pilihan presiden berhubungan signifikan dengan sikap terhadap PSBB. Begitu faktor sikap ini diabaikan maka pengalaman politik tersebut bisa berpengaruh langsung pada perilaku terkait PSBB.

Tabel 3. Analisa multivariate perilaku terkait PSBB

	B	Std. error	Beta	t	p-value
(Constant)	.608	.066		9.174	.000
Sikap Terhadap Kebijakan (indeks)	.086	.021	.119	4.148	.000
Pilihan Presiden 2019	.018	.015	.033	1.154	.249
Percaya Pemerintah Pusat	.011	.010	.031	1.090	.276
Bekerja vs Tidak Bekerja	-.077	.018	-.134	-4.187	.000
Agama: Islam	-.120	.023	-.149	-5.230	.000
Gender: Laki-laki	-.050	.017	-.094	-2.938	.003
N	1183				
R <sup>2</sup>	0.081				

Variabel terikat: Perilaku terkait kebijakan PSBB

Sementara dalam soal sikap terhadap berbagai aturan terkait PSBB, pengalaman pemilihan presiden 2019 berpengaruh signifikan ( $p \leq .05$ ) (Tabel 4). Pemilih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dibanding pemilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih banyak yang setuju dengan PSBB. Ini mengkonfirmasi temuan studi sebelumnya di Indonesia (Kuipers et al, 2020) dan sejumlah studi di negara lain yang menunjukkan kuatnya pengaruh politik terhadap sikap terkait perlunya membuat jarak sosial untuk menekan penyebaran Covid-19. (Grossman, et al, 2020; Alcott et al., 2020, Painter dan Qiu 2020, Adolph et al 2020).

Terkait dengan faktor politik lain adalah kepercayaan pada kemampuan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Kepercayaan ini juga berhubungan secara sangat signifikan dengan sikap terhadap PSBB ( $p \leq 0,001$ ) (Tabel 4). Warga yang percaya bahwa pemerintah mampu menanggulangi masalah Covid-19 mendukung berbagai ketentuan dalam PSBB dan protokol kesehatan.

Di samping itu, tingkat pendapatan dan pendidikan juga berpengaruh pada sikap mendukung PSBB lepas dari berbagai faktor lainnya. Semakin baik pendapatan seorang warga maka ia semakin mendukung PSBB. Hubungannya signifikan pada  $p \leq 0,05$  (Tabel 4). Orang yang berpenghasilan lebih baik mungkin punya daya tahan secara ekonomi untuk mengikuti pembatasan sosial, untuk tinggal di rumah saja. Orang dengan

pendapatan lebih baik biasanya juga berpendidikan lebih baik. Orang berpendidikan lebih baik mendukung PSBB mungkin karena pendapatannya lebih baik, dan pengetahuan tentang bahaya Covid-19 lebih baik juga. PSBB kemungkinan dipercaya dapat melindungi orang dari bahaya virus tersebut.

Tabel 4. Analisa multivariate sikap terhadap kebijakan terkait PSBB

Parameter	B	Std. Error	Beta	t	p-value
(Constant)	2.243	.066		33.980	.000
Pilihan Presiden 2019	.049	.022	.065	2.194	.028
Percaya Pemerintah Pusat	.097	.013	.209	7.240	.000
Pendidikan	.011	.005	.068	2.168	.030
Pendapatan	.007	.003	.077	2.489	.013
Etnis: Jawa	.019	.022	.026	.852	.395
Agama: Islam	-.108	.034	-.097	-3.207	.001
Gender: Laki-laki	-.048	.021	-.066	-2.305	.021
N	1149				
R <sup>2</sup>	0.078				

Variabel terikat: Sikap terhadap kebijakan terkait PSBB

Agama dan gender secara konsisten bukan hanya punya hubungan signifikan dengan perilaku tapi juga dengan sikap terhadap PSBB dan protokol kesehatan lepas dari berbagai faktor lainnya. Hubungannya juga sama-sama negatif. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, warga yang beragama Islam cenderung bersikap negatif pada PSBB karena sifat dasar ibadah dalam Islam berbeda dengan dalam agama lain. Sementara pengaruh perbedaan gender terhadap sikap atas PSBB terkait dengan konteks masyarakat secara umum yang mendiskriminasi perempuan. Laki-laki dibanding perempuan secara umum punya kesempatan lebih besar untuk berkegiatan di luar rumah, dan kemudian sudah menjadi kebiasaan untuk aktif di luar rumah. Karena itu laki-laki dibanding perempuan lebih banyak yang bersikap menentang PSBB.

## Penutup

Walaupun dampaknya sangat masif, studi ilmiah tentang sosial-politik terkait Covid-19 masih sedikit, termasuk di Indonesia, karena gejala ini relatif masih baru. Tulisan ini pertama-tama mengisi kekurangan ini dengan bersandar pada hasil penelitian tentang perilaku dan sikap warga negara Indonesia dewasa secara nasional terkait dengan kebijakan PSBB ketika kebijakan ini sedang berjalan di sejumlah daerah dan ketika protokol kesehatan berlaku secara nasional. Mengamini Kuipers at al (2020) maupun Mujani (2020), tulisan ini melihat pentingnya pengaruh sosial-ekonomi terhadap sikap dan perilaku warga terhadap PSBB dan protokol kesehatan. Warga yang berasal dari kelompok yang lebih rendah pendapatannya dan lebih rendah tingkat pendidikannya cenderung tidak patuh pada ketentuan-ketentuan PSBB. Di samping itu, laki-laki

dibanding perempuan cenderung melanggar PSBB karena laki-laki selama ini lebih biasa berkegiatan di luar rumah. Perempuan karena umumnya kurang memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan di luar rumah cenderung mendukung PSBB. Perbedaan sikap dan perilaku ini kemungkinan akibat dari pembagian kerja secara seksual yang selama ini dianggap wajar dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dari perspektif pentingnya kepatuhan pada PSBB, diskriminasi seksual tersebut di luar dugaan membuat perempuan berperilaku dan bersikap positif dalam konteks pandemi Covid-19. Perlu pendalaman lebih jauh mengenai hubungan gender dan kepatuhan terhadap PSBB ini.

Tulisan ini mengidentifikasi bahwa warga yang tidak menaati aturan terkait PSBB dan protokol kesehatan, terutama disebabkan karena keharusan kerja di luar rumah. Tidak taat pada kebijakan PSBB dan protokol kesehatan terbukti terkait dengan latar belakang sosial-ekonomi warga. Warga yang biasa bekerja sebelum Covid-19 cenderung melanggar PSBB. Akibatnya, untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih lanjut sulit mengandalkan PSBB. Warga yang bersikap negatif pada PSBB tercatat lebih banyak memiliki latar belakang pendidikan dan pendapatan lebih rendah. Pendapatan dan pendidikan berhubungan erat. Karena penghasilannya rendah, maka ia tidak sanggup hidup tanpa harus bekerja secara teratur di luar rumah kecuali ia mendapat jaminan sosial selama tinggal di rumah dan tidak bekerja. Karena kemampuan negara terbatas, maka PSBB secara luas bukan kebijakan yang realistis. Kebijakan sekarang yang melonggarkan PSBB dengan “tatanan normal baru” merupakan konsekuensi dari kapasitas negara yang terbatas tersebut. Warga yang beragama Islam dan laki-laki cenderung tidak patuh pada PSBB dan protokol kesehatan. Perhatian lebih khusus terhadap kelompok masyarakat ini harus diberikan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

Politik Indonesia sejak pemilihan presiden 2019 masih terpolarisasi. Polarisasi ini berpengaruh terhadap respon warga pada berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemilih Joko Widodo cenderung patuh pada PSBB dibanding pemilih Prabowo Subianto karena ikatan politiknya dengan Presiden. Ikatan politik pemilih Prabowo Subianto dengannya juga sama kuat. Karena itu, pemuka-pemuka pendukung Prabowo juga menjadi penting untuk mensosialisasikan mendesaknya mematuhi protokol kesehatan untuk meredam meluasnya wabah Covid-19 di tanah air demi kesehatan publik dan pemulihan krisis ekonomi akibat wabah Covid-19 tersebut.

## Apendiks 1

### Pengukuran, coding, dan indexing

No	Variable	Keterangan
1	Indeks Perilaku Terhadap Kebijakan	Indeks gabungan 5 item: (1) Tidak pulang kampung untuk idul fitri dan tahu pemerintah mengimbau tidak mudik, (2)

<sup>14</sup> Tentang pembagian kerja secara seksual lihat misalnya Budiman (1985).



---

		Tidak keluar rumah untuk bekerja dalam seminggu terakhir, (3) Tidak keluar rumah untuk ibadah dalam seminggu terakhir, (4) Tidak Naik ojek/ojek online dalam seminggu terakhir, (5) Tidak Mendatangi kegiatan di tempat umum dengan peserta lebih dari 5 orang dalam seminggu terakhir. Masing-masing item diukur dengan skala 0-1 (1=tidak melakukan, 0=melakukan/tidak jawab). Tidak melakukan tidak sama dengan “tidak menjawab”, tapi dalam <i>coding</i> ini dibuat dalam dua kategori: tidak melakukan (1) versus selainnya (0= melakukan atau tidak menjawab). Seluruh item dirata-ratakan sehingga membentuk indeks dengan skala 0-1 (1=Taati, 0=Tidak taati). Alpha indeks ini 0,595. (indeks ini tidak terlalu tinggi tapi kami gunakan untuk menyederhanakan jumlah item dari perilaku terkait PSBB). Indeks gabungan 14 item, (1) Setuju PSBB Bekerja di rumah, kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang ditetapkan pemerintah, (2) Setuju PSBB Kegiatan keagamaan di rumah masing-masing, (3) Setuju PSBB Kegiatan di tempat umum yang mendatangkan lebih dari 5 orang dilarang, (4) Setuju PSBB Mobil pribadi dikurangi penumpangnya, (5) Setuju PSBB Angkutan umum dikurangi jumlah penumpangnya menjadi setengah dari biasanya, (6) Setuju PSBB Sepeda motor tidak boleh membonceng, (7) Setuju PSBB Ojek/ ojek on-line tidak boleh bawa orang, hanya boleh antar barang, (8) Percaya Strategi PSBB Mampu Cegah Covid-19, (9) Percaya menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain bisa mencegah Covid-19, (10) Percaya Memakai masker bisa mencegah Covid-19, (11) Percaya Sering cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir bisa mencegah Covid-19, (12) Percaya Tidak ke luar rumah bisa mencegah Covid-19, (13) Setuju sanksi bagi yang Melanggar PSBB. (14) Setuju sanksi pidana bagi pelanggar PSBB. Masing-masing item diukur dengan skala 1-5 (1=sangat tidak setuju/tidak percaya, 5=sangat setuju/percaya). Indeks dibuat dengan menjumlah seluruh skor 13 item tersebut dan dirata-ratakan hingga membentuk indeks berskala 1-5 (1 = sangat tidak setuju/tidak yakin sampai 5 = sangat setuju atau sangat yakin). Alpha indeks ini 0,801.
2	Sikap terhadap Kebijakan	
4	Pilihan Presiden 2019	1=Memilih Jokowi dalam Pilpres 2019, 0=Lainnya.
5	Percaya Pemerintah Pusat bisa mengatasi COVID-19	1=Tidak percaya sama sekali, 5=Sangat percaya.
6	Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Dibanding Sebelum COVID-19	1=Jauh lebih buruk, 5=Jauh lebih baik.
7	Gender	1=Laki-laki, 0=Perempuan
8	Umur	Dalam tahun
9	Desa-Kota	1=Pedesaan, 0=Perkotaan
10	Pendidikan	Skala 1-10: 1=tidak pernah sekolah, 10=tamat S1 atau lebih tinggi
11	Pendapatan	Skala 1-21: 1=di bawah 200 ribu, 21=Lebih dari 20 juta.
12	Status pekerjaan: Bekerja	1=Bekerja, 0=Tidak bekerja
13	Etnis	1=Jawa, 0=Lainnya
14	Agama	1=Islam, 0=Lainnya.

---

## Appendiks 2 Metodologi dan Data

Penjelasan tentang metodologi di bawah ini disalin dari Mujani (2020) dan disesuaikan waktu pelaksanaan pengambilan data dan jumlah sampelnya. Metode penarikan sampelnya sama. Data yang relevan dengan kebutuhan tulisan ini adalah data opini publik nasional yang secara standar diperoleh lewat survei opini publik berskala nasional. Sumber data untuk tulisan ini berasal dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang telah melakukan survei tentang sikap dan perilaku publik terkait wabah Covid-19 pada 23-26 April 2014.

Pada prinsipnya, metode yang digunakan dalam survei ini bersandar pada probability sampling dengan populasi nasional. Artinya semua warga negara dewasa atau yang berumur 17 tahun atau lebih di seluruh tanah air berkesempatan sama untuk terpilih menjadi responden sehingga responden tersebut mencerminkan karakteristik populasi nasional dengan toleansi kesalahan tertentu atau dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk mendapatkan sampel yang representatif secara nasional, maka populasi nasional distrata terlebih dahulu menurut provinsi, menurut desa dan kota, dan menurut jender.

Selanjutnya, agar survei bisa dilakukan secara efisien maka populasi diklaster menurut desa/kelurahan, menurut Rukun Tetangga (RT) atau Lingkungan, dan menurut Kartu Keluarga (KK). Jumlah sampel awal pada survei Maret sebesar 2200. Dalam survei ini ditetapkan per kelurahan atau desa akan dipilih 10 responden. Karena itu dipilih secara random 220 desa atau kelurahan sebagai primary sampling unit, dan jumlahnya proporsional menurut populasi provinsi. Pada desa atau kelurahan terpilih kemudian didaftar RT yang ada di desa atau kelurahan terkait. Ditetapkan tiap RT akan diwawancarai satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, maka dipilih 5 RT secara random dari daftar RT tersebut. Pada RT terpilih kemudian didaftar KK, dan dipilih 2 KK secara random. Pada KK terpilih kemudian didaftar anggota keluarga yang berumur 17 tahun atau lebih atau telah menikah yang berjenis kelamin perempuan saja atau laki-laki saja, dan dipilih satu dari mereka secara random dengan menggunakan Kish grid. Bila pada KK pertama yang mendapat kuota untuk diwawancarai laki-laki maka pada KK berikutnya harus perempuan. Demikianlah pemilihan responden dilakukan untuk survei dengan wawancara tatap muka langsung.

Serangkaian survei dengan metode di atas dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden dalam 4 tahun terakhir (sejak Juni 2016). Total responden dari rangkaian survei tersebut sebanyak 50,089 orang. Di antara mereka 74% (37,035 orang) memiliki telepon. Karena sedang terjadi musibah pandemi Covid-19 dan pada bulan April 2020 sedang diberlakukan PSBB dan protokol kesehatan secara nasional, dan transportasi antara daerah juga sangat dibatasi, maka tidak bisa dilakukan survei dengan wawancara tatap muka langsung. Sebagai penggantinya dilakukan lewat telepon pada responden yang punya telepon tersebut. Dari 37,035 responden pemilik telepon tersebut sebanyak 1200 orang dipilih secara random untuk menjadi sampel pada survei 23-26 April yang hasilnya sebagai data untuk dianalisa dan hasilnya dilaporkan dalam tulisan ini.

Responden yang berbasis pada populasi yang pemilik telepon jelas tidak mewakili 100% populasi nasional. Hanya mewakili 74% dari mereka. Maka hasil survei ini bisa digeneralisasi pada pemilik telepon yang berjumlah 74% dari total populasi tersebut. Namun demikian agar karakteristik responden tidak banyak berbeda dengan karakteristik populasi maka dilakukan pembobotan responden sedemikian menurut populasi. Dengan demikian karakteristik demografi

responden survei dan populasi dari sensus tidak berbeda signifikan (Tabel 5). Di dalam estimasi, sampling weight ini digunakan sebagai probability weight ketika menghitung standard error koefisien estimasi pada Tabel 3 dan 4.

## Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini didasarkan atas data yang tersedia di Saiful Mujani Reserach and Consulting (SMRC) dan karena itu kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan data untuk penulisan ini, terutama pada direktur eksekutif SMRC Dr. Sirajuddin Abbas. Kami juga mengucapkan terima kasih atas saran-saran dua reviewer anonim untuk memperbaiki naskah awal kami ini.

## Pendanaan

Data untuk tulisan ini bersandar pada hasil survei opini publik SMRC yang dibiayai sendiri oleh perusahaan tersebut untuk item-item terkait dalam tulisan ini.

## Daftar Pustaka

- Adolp, C et al, 2020, "Pandemic Politics: Timing State-Level Social Distancing Responses to Covid-19," <https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/5e8f4e5868bfcc00122e8084> diakses 18 Juli 2020 jam 10:22).
- Allcott, Covid et al, 2020, "Polarization and Public Health: Partisan Differences in Social Distancing during the Coronavirus Pandemic," [http://web.stanford.edu/~gentzkow/research/social\\_distancing.pdf](http://web.stanford.edu/~gentzkow/research/social_distancing.pdf) Dikases tgl 3 Juli 2020 jam 10:33.
- Arriola, L, dan A Grossman, 2020 (akan terbit), "Ethnic Marginalization and (Non)Compliance in Public Health Emergencies," *Journal of Politics*, <https://Covid.allisongrossman.com/ag-working-paper> diakses 3 Juli 2020, jam 19:52
- Bhanot, S, dan DJ Hopkins, 2020, "Partisan Polarization and Resistance to Elite Messages: Results from a Survey Experiment on Social Distancing," <https://ssrn.com/abstract=3593450> atau <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3593450>. Diakses 3 Juli 2020, jam 19: 53
- Budiman, A, 1985, *Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Campbell, A, et al, 1960, *American Voter*, Chicago: Chicago University Press.
- Curtice, J 2007, "Comparative Opinion Surveys." Dalam R.J. Dalton dan COVID-D Klingemann (editor). *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press.
- Dzakwan, MHA, 2020, "Loose or Lose: Relaxation of Religious Services in Indonesia During Covid-19?" <https://Covid.csis.or.id/publications/loose-or-lose-relaxation-of-religious-services-in-indonesia-during-COVID-19> Diakses 3 Juli 2020, jam 20: 05.
- Gadarian, SK et al, 2020, "Partisan Endorsement Experiments Do Not Affect Mass Opinion on Covid-19," SSRN: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3574605](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3574605) diakses 25 Agustus 2020, jam 10:11.
- Grossman, G et al, 2020, "Political Partisanship Influences Behavioral Responses to Governors' Recommendations for Covid-19 Prevention in the United States,"

- [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3578695](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3578695) diakses hari Jumat 3 Juli 2020 jam 10:12
- Gustomy, R (2020), "Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter," *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 5, no. 2, pp. 190-205, <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8781>
- Jaffrey, S 2020, "Coronavirus Blunders in Indonesia Turn Crisis into Catastrophe," <https://carnegieendowment.org/2020/04/29/coronavirus-blunders-in-indonesia-turn-crisis-into-catastrophe-pub-81684> Diakses 3 Juli 2020 jam 20:01
- Kuipers, N, et al, 2020, "Encouraging Indonesians to Pray From Home During the Covid-19 Pandemic," *Journal of Experimental Political Science*. <https://doi.org/10.1017/XPS.2020.26>
- Mietzner, M 2020, "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped its Covid-19 Response," *Journal of Southeast Asian Affairs* <https://doi.org/10.1177/2F1868103420935561>
- Mujani, S, 2020, (segera terbit). "Asesmen publik atas kinerja pemerintah Indonesia menangani wabah Covid-19. Sebuah penjelasan ekonomi politik." *Jurnal Penelitian Politik*.
- Painter, M dan T Qiu, 2020, "Political beliefs affect compliance with Covid-19 social distancing orders," <https://voxeu.org/article/political-beliefs-and-compliance-social-distancing-orders>
- Saiful Mujani Reserach and Consulting(SMRC), 2020, "Wabah Covid-19 : Sikap atas Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Warga," <https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2020/04/rilis-Covid-april-2020-final-rev-1.pdf> Diakses 3 Juli 2020, jam 19: 39.
- Ulbig, Stacy G. (2008), Voice is Not Enough: The Importance of Influence in Political Trust and Policy Assessments, *Public Opinion Quarterly*, Volume 72, Issue 3, hlm. 523–539, <https://doi.org/10.1093/poq/nfn030>
- Wang, Chia-Chou (2018) Primordialism, Instrumentalism, Constructivism: Factors Influencing Taiwanese People's Regime Acceptance of Mainland China's Government, *Journal of Contemporary China*, 27:109,137-150 DOI: 10.1080/10670564.2017.1363026

## Daftar Informan

Wawancara dengan Dr. Martin L. Sinaga, seorang pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun, dan seorang dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Wawancara dilakukan 19 Juli 2020.

## Tentang Penulis

**Saiful Mujani** adalah dosen ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penulis memiliki minat studi terutama pada kajian: opini publik, perilaku politik, demokratisasi, agama dan politik, dan gerakan sosial.

**Deni Irvani** adalah direktur riset di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Penulis saat ini sedang menyelesaikan studi program doktor di bidang statistika di Institut Pertanian Bogor (IPB).